

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dilakukan oleh semua negara, baik negara - negara yang relatif sudah maju maupun yang belum maju. Todaro mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Karena adanya proses pembangunan di setiap daerah maka akan menimbulkan ketimpangan, oleh karena itu perlu pembenahan dalam membuat suatu kebijakan agar ketimpangan di setiap daerah bisa menurun (Syafrizal, 2012).

Menurut BPS, dalam mengukur ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat dapat dilihat dengan indeks gini (gini ratio). Kisaran dalam indeks gini yaitu 0 - 1. apabila angka indeks gini mendekati 0 menandakan bahwa ketimpangan semakin rendah (merata), namun jika indeks gini mendekati angka 1 maka menandakan bahwa ketimpangan antar masyarakat semakin tinggi atau melebar (<https://yogyakarta.bps.go.id/>).

Tabel 1.1
Gini Ratio Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013 - 2017

Provinsi	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DKI Jakarta	0.433	0.431	0.431	0.411	0.413	0.394
Jawa Barat	0.411	0.413	0.415	0.413	0.403	0.407
Jawa Tengah	0.387	0.379	0.382	0.366	0.365	0.378
DI Yogyakarta	0.439	0.419	0.433	0.420	0.432	0.441
Jawa Timur	0.364	0.369	0.415	0.402	0.396	0.379
Banten	0.399	0.395	0.401	0.394	0.382	0.385
Indonesia	0.413	0.406	0.408	0.397	0.393	0.389

Sumber : BPS

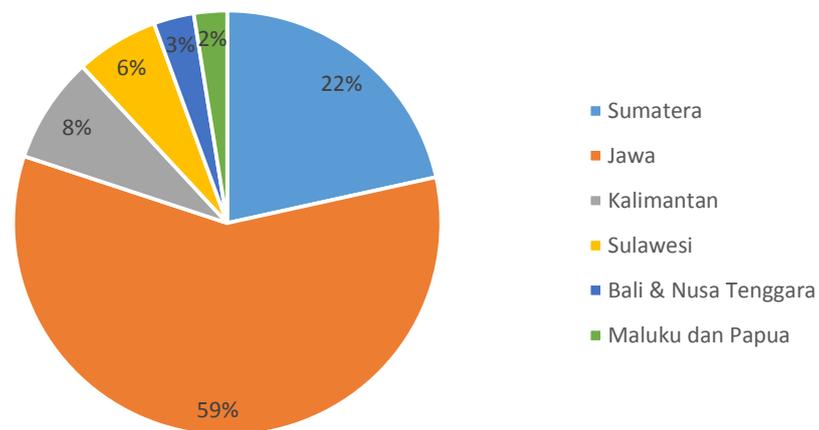
Berdasarkan tabel 1.1 nilai *gini ratio* 2017 dan 2018 tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,432 dan terendah di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,365. Terdapat empat Provinsi dengan nilai *gini ratio* di atas angka nasional tahun 2017 sebesar 0,393, yaitu tertinggi Provinsi DI Yogyakarta (0,432), DKI Jakarta (0,413), Jawa Barat (0,403), Jawa Timur (0,396).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Lili Masli, 2008). Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk

Domestic Bruto pada suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu Provinsi, Kabupaten, atau Kota (Kuncoro, 2004)

Gambar 1.1
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional
Triwulan III-2018 (persen)

Kontribusi Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional
Triwulan III-2018 (persen)



Sumber : BPS Indonesia, data diolah

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa Provinsi Pulau Jawa memegang peranan yang paling tinggi untuk PDB Nasional sebesar 59% diikuti Pulau Sumatera dengan 22% selanjutnya Pulau Kalimantan sebesar 8%, Pulau Sulawesi sebesar 6%, kemudian Pulau Bali & Nusa Tenggara sebesar 3% dan yang terakhir Pulau Maluku dan Papua sebesar 2%.

Tabel 1.2
PDRB Provinsi Pulau Jawa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017

Provinsi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	1.296.380	1.373.389	1.454.564	1.540.078	1.635.856
Jawa Barat	1.093.544	1.149.216	1.207.232	1.275.528	1.342.953
Jawa Tengah	726.655	764.959	806.765	849.313	894.050
DI Yogyakarta	75.627	79.536	83.474	87.688	92.301
Jawa Timur	1.192.790	1.262.684	1.331.376	1.405.561	1.482.148
Banten	331.099	349.351	368.377	387.824	409.960

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat dari PDRB Provinsi Pulau Jawa bahwa DI Yogyakarta mempunyai nilai PDRB yang paling di karenakan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa memiliki jumlah yang paling sedikit, tercatat PDRB Provinsi DIY pada tahun 2017 sebesar 92.301 miliar rupiah, Provinsi Banten sebesar 409.960, di ikuti Provinsi Jawa Tengah sebesar 89.050miliar rupiah, selanjutnya Provinsi Jawa Barat sebesar 1.342.953 miliar rupiah, Provinsi Jawa Timur sebesar 1.482.148 miliar rupiah dan Provinsi DKI Jakarta menduduki posisi tertinggi di Pulau Jawa sebesar 1.635.856 miliar rupiah.

Secara spasial tahun 2017, gambaran perekonomian D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa kabupaten sleman memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB DIY yaitu 33,64 persen, diikuti oleh kota Yogyakarta sebesar 26,27 persen. Sementara kontribusi terendah adalah Kabupaten Kulonprogo yakni sebesar 7,60 persen. Sementara proksi besaran pendapatan penduduk

dengan PDRB perkapita menurut Kab/Kota, penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta PDRB perkapitanya masih yang tertinggi dan posisi kedua Kabupaten Sleman. PDRB perkapita Kota Yogyakarta hampir 3 kali lipat daripada PDRB perkapita Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul (BPS DIY, 2018).

PDRB memiliki pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Fenomena tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut Arthur Lewis, semua sektor ekonomi harus tumbuh serentah untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara industri dan pertanian, salah satu caranya adalah dengan mengalihkan kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri. Dalam keadaan demikian, peranan pertumbuhan ekonomi mengandung sifat elastisitas tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja bersumber dari ekspansi kegiatan sektor modern (M.L Jhingan, 2010).

Tabel 1.3
TPAK Provinsi D.I. Yogyakarta Menurut Kab/Kota
Tahun 2011 - 2017 (persen)

Kab/kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kulonprogo	75.17	75.40	75.61	82.33	72.62	80.20	74.61
Bantul	70.96	71.26	66.78	74.26	67.84	69.27	72.21
Gunungkidul	75.93	80.43	77.87	83.57	70.77	75.14	74.50
Sleman	66.07	66.44	65.67	76.55	65.45	69.67	70.17
Kota Yogyakarta	67.05	67.28	64.38	81.02	66.70	71.05	65.72
DIY	70.39	71.52	69.29	71.05	68.38	71.96	71.52

Sumber : BPS DIY 2018

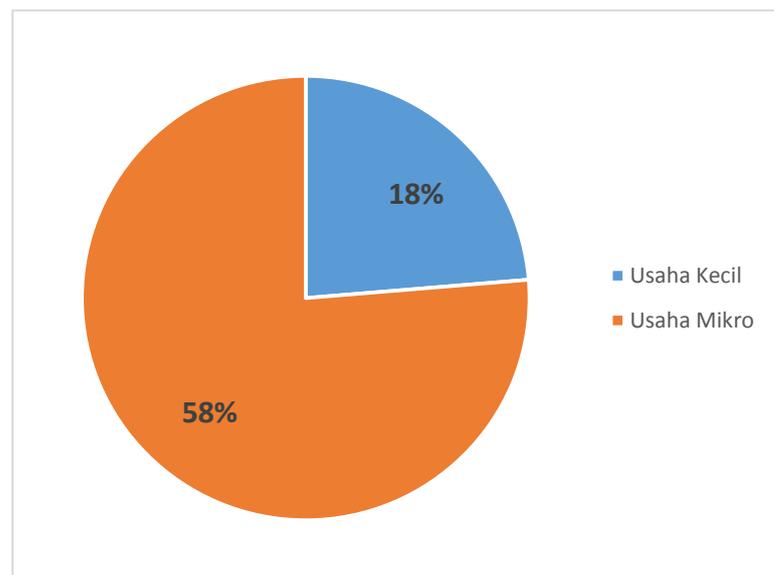
Berdasarkan tabel 1.3 maka dapat terlihat bahwa TPAK tahun 2017 tertinggi yaitu Kabupaten Kulonprogo sebesar 74,61% dan terendah yaitu Kota Yogyakarta sebesar 65,72%. Analisis angkatan kerja dalam kaitanya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. “modal pembangunan yang penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah selain keuangan daerah adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang bisa dilihat dari tingkat pasrtisipasi angkatan kerja. (Wiratno, 2009: 8)

Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata memiliki potensi yang tinggi sebagai daerah maju. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang dimiliki cukup strategis dan memiliki jumlah yang

melimpah. Namun persebaran persebaran investasi yang tidak merata di Provinsi D.I. Yogyakarta tentunya akan berdampak pada kesenjangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja (Hartini, 2017). Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta berusaha mendorong UMKM untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Gambar 1.2

Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Usaha, 2007



Sumber : BPS, SE2016-Lanjutan

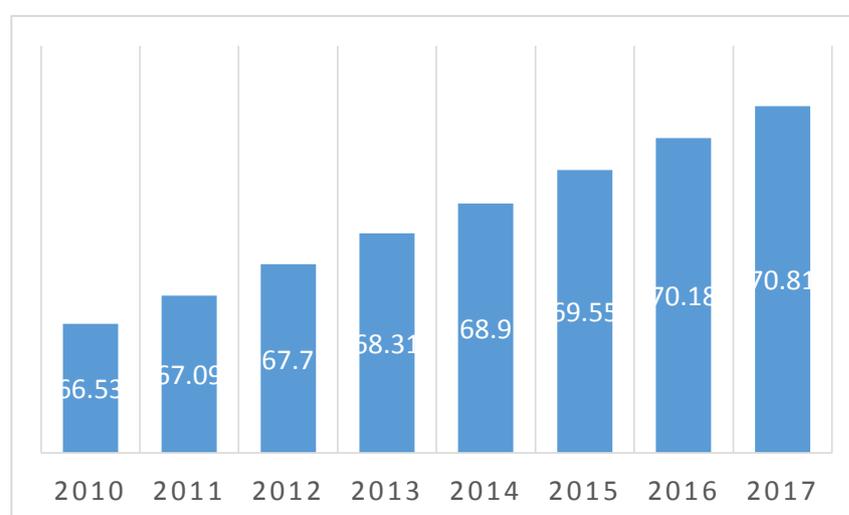
Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa jumlah penyerapan tenaga kerja pada Usaha Mikro mendominasi di Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 58%. Giaoutzi et all (1998) menegaskan UKM sebagai faktor pembangunan regional yang bersifat *indegenous* memiliki akar dengan struktur ekonomi lokal. Menurutnya, UKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi regional yang mampu mereduksi ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik antar wilayah ternyata masih menyisakan beberapa masalah misalnya saja adanya perbedaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta perbedaan investasi yang belum merata yang menimbulkan adanya wilayah yang tertinggal. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan perkapita antar masyarakat dalam suatu Provinsi (Darzal, 2016).

Kenyataan yang menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki indeks pembangunan yang berbeda-beda membuat indeks pembangunan manusia juga berkaitan erat dengan adanya ketimpangan pendapatan. Rendahnya angka indeks pembangunan manusia menyebabkan produktivitas yang dihasilkan oleh masyarakat juga menurun dan kemudian berdampak pada pendapatan masyarakat yang juga mengalami penurunan dan begitu juga sebaliknya (Pradnyadewi & Purbadharmaja, 2017).

Grafik 1.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010 - 2017



Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika pada grafik 1.1 Indeks pembangunan Manusia (IPM) atau yang dikenal dengan *Human Development Indeks (HDI)* di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017, angka IPM Indonesia sebesar 70,81. IPM Indonesia tumbuh 0,90% atau bertambah 0,63 poin dibandingkan tahun 2016. pertumbuhan tersebut sedikit lebih lambat dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,91%.

Tabel 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten / Kota
Di D.I. Yogyakarta Tahun 2013 -2017 (Persen)

Kab/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kulon Progo	70.14	70.14	71.52	71.52	72.38
Bantul	76.78	76.78	77.99	78.42	78.67
Gunung Kidul	66.31	66.31	67.41	67.82	68.73
Sleman	80.26	80.26	81.2	82.15	82.85
Kota Yogyakarta	83.61	83.61	84.56	85.32	85.49
DIY	76.44	76.44	77.59	78.38	78.89
Nasional	68.31	68.31	69.55	70.18	70.81

Sumber : BPS Yogyakarta

Berdasarkan tabel 1.2 IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 85,49 persen sedangkan IPM terendah yakni Kabupaten Gunungkidul yang baru mencapai 68,73 persen. IPM Daerah Istimewa Yogyakarta masih berada di atas IPM Nasional. IPM D.I. Yogyakarta pada tahun 2017 mencapai 78,89 persen sedangkan di tingkat Nasional sebesar 70,81 persen.

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Astuti (2015) menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di DIY. Hal ini dikarenakan usia harapan hidup yang tinggi menyebabkan usia non-produktif di Provinsi DIY, sehingga memicu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwa ketimpangan ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks (World Bank, 2016). Ketimpangan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor semata, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor dan umumnya faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Merujuk pada latar belakang, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam Analisis Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2011 - 2017 dengan rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta?

4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

- a. Untuk Mahasiswa

Penulisan ini dapat dijadikan bahan acuan bagi penulisan selanjutnya, sehingga memudahkan mahasiswa dalam menemukan referensi yang tepat dengan judul yang akan diolahnya. Selain itu mahasiswa juga bisa lebih mudah dalam mengoptimalkan hasil penelitiannya kelak yang diambil dari kekurangan dalam tulisan ini.

- b. Untuk Masyarakat

Masyarakat yang menyimak tulisan ini dengan baik akan mengetahui alasan jumlah pengangguran yang berfluktuasi, sehingga diharapkan dapat

membangunkan semangat untuk membuka peluang usaha yang lebih luas lagi dan selanjutnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

c. Untuk Pemerintah

Dengan penulisan ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah untuk lebih membuka mata dalam menyikapi permasalahan ekonomi yang timbul di negara Indonesia untuk selanjutnya dibuat kebijakan yang bermanfaat bagi bangsa.